

ABSTRAK

Mega Asna Naqiyya, Perlindungan Hukum Terhadap Perubahan Jadwal Dan Fasilitas Sepihak Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Semarang, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang, 2022

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada calon jamaah umrah terutama khususnya Negara Republik Indonesia dan diperkuat oleh kebijakan Arab Saudi yang mengeluarkan kebijakan pencegahan virus corona yang menanggihkan visa sehingga berdampak pada tertutupnya akses bagi para jamaah umrah. Agen travel tidak bisa maksimal melakukan kewajibannya sehingga jamaah terpaksa ditunda keberangkatannya yang mana hal tersebut menurut hukum perlindungan konsumen menderita kerugian karena tidak mendapatkan hak sesuai dengan yang telah dibayarkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara inaction pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen travel umroh tidak dapat memenuhi prestasinya dikarenakan keadaan yang tidak terduga sehingga agen travel umroh tersebut bisa dikatakan Force Majeur. Pelaksanaan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah dilaksanakan oleh agen travel umroh yaitu dalam bentuk penjadwalan ulang keberangkatan.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tindakan Sepihak PPIU.

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has had a major impact on prospective Umrah pilgrims, especially the Republic of Indonesia and was strengthened by the policy of Saudi Arabia which issued a corona virus prevention policy which suspended visas so that it had an impact on closing access for Umrah pilgrims. Travel agents cannot maximally carry out their obligations so that pilgrims have to postpone their departures, which according to consumer protection law suffers losses because they do not get rights according to what has been paid. The research method used in this study uses an empirical juridical approach. Empirical normative research is legal research regarding the application of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. The results showed that the Umrah travel agent was unable to fulfill his achievements due to unforeseen circumstances so that the Umrah travel agent could be said to be Force Majeur. The implementation of the responsibilities as stipulated in the Consumer Protection Act has been carried out by the Umrah travel agent, namely in the form of rescheduling of departures.

Keywords: consumer protection,